



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

2025

Provinsi Kepulauan Riau



BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. APBN TA 2025 disusun dengan mempertimbangkan faktor perekonomian global dan dilandaskan pada bauran kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mendorong pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, serta memberikan ruang untuk pelaksanaan program pemerintahan selanjutnya. Hal tersebut diperlukan agar peralihan pemerintahan dapat dilakukan secara lancar pada masa transisi. Kebijakan fiskal yang disusun diharapkan dapat menjawab tantangan, baik struktural maupun siklikal, yang berasal dari global dan domestik.

Pada tahun 2025, dunia diproyeksikan masih akan dihadapkan dengan berlanjutnya ketegangan geopolitik antarnegara yang menimbulkan perang, fragmentasi, proteksionisme, dan disrupsi rantai pasok sehingga menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi, dan pupuk melambung tinggi. Selain itu, suku bunga global yang bertahan tinggi, lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia, dan gejolak pasar keuangan turut mempengaruhi risiko global. Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian, investasi, dan ekspor, lebih baik dibandingkan global. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih tumbuh sebesar 5,1% di Triwulan ke-3 2024 (y-on-y).

Sebagai tahun pertama pemerintahan baru, tahun 2025 akan menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sebelumnya. Belanja APBN menjadi instrumen untuk merespon tantangan struktural dan mengamankan dari berbagai guncangan (*shock absorber*), dirancang fleksibel dengan menyediakan ruang fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Akselerasi transformasi ekonomi terus ditingkatkan melalui revitalisasi industri termasuk hilirisasi dan ekosistem *electric vehicles (EV) industry*, penguatan sektor jasa termasuk ekonomi kreatif dan digitalisasi, serta penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan *ease of doing business*, dan memperkuat daya saing produk ekspor dan investasi.

Selanjutnya, guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara maju dan keluar dari jebakan *middle income trap* diperlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, APBN harus didorong untuk semakin sehat agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan makro fiskal tahun 2025 diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan program prioritas dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, APBN TA 2025 disusun sebagai jangkar untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan kebijakan *countercyclical* yang terukur dan terkendali. Indonesia perlu mengakselerasi

pertumbuhan ekonomi hingga 6 bahkan 8% agar mampu keluar dari *middle income trap* dengan cara menciptakan produktivitas untuk meningkatkan kemakmuran. Indonesia harus bisa membangun daya saing dan produktivitas di pasar dunia, serta menekan korupsi.

Pengelolaan fiskal daerah berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) beserta peraturan pelaksanaan turunannya. Sesuai tujuan pembentukannya, UU HKPD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mendorong sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif;
3. Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing*, dan konvergensi);
4. Perbaiki kualitas belanja APBD;
5. Penguatan *local taxing power*;
6. Pengembangan pembiayaan inovatif; dan
7. Memperbaiki mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) guna menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah.

Sejalan dengan pokok arah kebijakan fiskal dan dalam rangka menghadapi tantangan strategis di atas, maka kebijakan TKD TA 2025 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal dengan memperkuat penggunaan *earmarking* Dana Alokasi Umum (DAU), meningkatkan efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK), dan mengoptimalkan Dana Desa, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.
2. Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dimana TKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan pariwisata.
3. Memperkuat sinergi kebijakan fiskal dimana kebijakan TKD disinergikan dengan kebijakan fiskal pusat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Memperluas cakupan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga diharapkan kebijakan TKD dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, alokasi TKD mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun dan telah mencapai 25,8% dari total APBN TA 2025. Pada TA ditetapkan sebesar Rp919,9 triliun, termasuk di dalamnya Dana Desa sebesar Rp71,0 triliun. Rincian alokasi masing-masing jenis Transfer ke Daerah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025.

Buku ini diterbitkan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai alokasi masing-masing jenis dana TKD tersebut. Saya berharap, buku ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan APBD TA 2025. Mengingat pentingnya APBN TA 2025 sebagai pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang, maka saya berharap kepada segenap pemerintah daerah untuk segera memanfaatkan dana TKD tersebut sesuai dengan arah kebijakan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah lainnya untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan". Akhir kata, saya mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan TKD TA 2025. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 24 Oktober 2024

MENTERI KEUANGAN,



Abu SRI MULYANI INDRAWATI *h*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2025	1
REKAPITULASI ALOKASI SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU	12
1. PROVINSI KEPULAUAN RIAU	13
2. KAB. NATUNA.....	14
3. KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	15
4. KAB. KARIMUN.....	16
5. KOTA BATAM	17
6. KOTA TANJUNG PINANG.....	18
7. KAB. LINGGA	19
8. KAB. BINTAN	20
TIM PENYUSUN BUKU.....	21

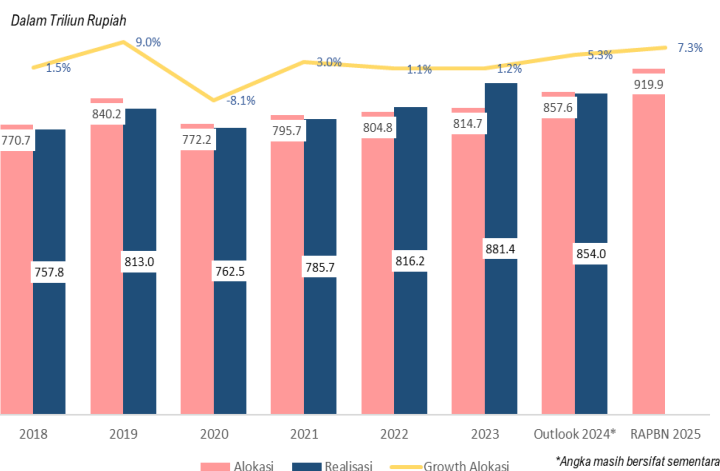


RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025



TRANSFER KE DAERAH (TKD) TA 2025

Diarahkan untuk Mendorong Belanja Daerah yang Efektif dan Efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah



KEBIJAKAN UMUM TKD 2025

- 1 Sinergi dan harmonisasi fiskal pusat dan daerah.
- 2 Menciptakan kegiatan ekonomi baru (*growth, wellbeing, dan konvergensi*).
- 3 Perbaikan kualitas belanja APBD.
- 4 Penguatan *local taxing power*.
- 5 Pengembangan pembiayaan inovatif.

Peningkatan alokasi TKD antara lain dipengaruhi oleh:

- peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH,
- dukungan pendanaan untuk PPPK,
- penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan
- dukungan penganggaran untuk prioritas nasional

POSTUR TRANSFER KE DAERAH TA 2025

URAIAN	2023	2024	2024	2025
	Realisasi (Audited)	Perpres 76/2023	Outlook	RUU APBN 2025
1. Dana Bagi Hasil	205,7	143,1	143,1	192,3
2. Dana Alokasi Umum	398,0	427,7	427,7	446,6
- DAU tidak ditentukan penggunaannya	288,9	343,5	343,5	358,6
- DAU ditentukan penggunaannya :	109,1	84,2	84,2	88,0
▪ Penggajian Formasi PPPK	25,7	15,7	15,7	17,3
▪ Pendanaan Kelurahan	1,6	1,7	1,7	1,7
▪ Pendanaan Layanan Publik	81,7	66,8	66,8	69,0
3. Dana Alokasi Khusus	181,4	188,1	184,9	185,2
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	50,3	53,8	51,1	36,9
b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	128,1	133,8	132,7	146,7
c. Hibah ke Daerah	2,9	1,2	1,1	1,6
4. Dana Otonomi Khusus	17,2	18,3	18,3	17,5
5. Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	1,4	1,4	1,2
6. Dana Desa	69,9	71,0	70,9	71
7. Insentif Fiskal	7,9	8,0	7,8	6,0
TOTAL TKD	881,5	857,6	854,0	919,9

Penjelasan Pagu Anggaran TKD TA 2025:

DBH naik sebesar Rp 49,2 T karena:

- ✓ Peningkatan proyeksi penerimaan negara
- ✓ Alokasi Kurang Bayar DBH Rp27,8 T.

DAU naik sebesar Rp 18,9 T karena:

- ✓ Dukungan penggajian formasi ASND 2025 dan dukungan penggajian PPPK yang telah diangkat.
- ✓ Diusulkan untuk pergeseran DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaannya

DAK Nonfisik naik sebesar Rp 13,9 T karena:

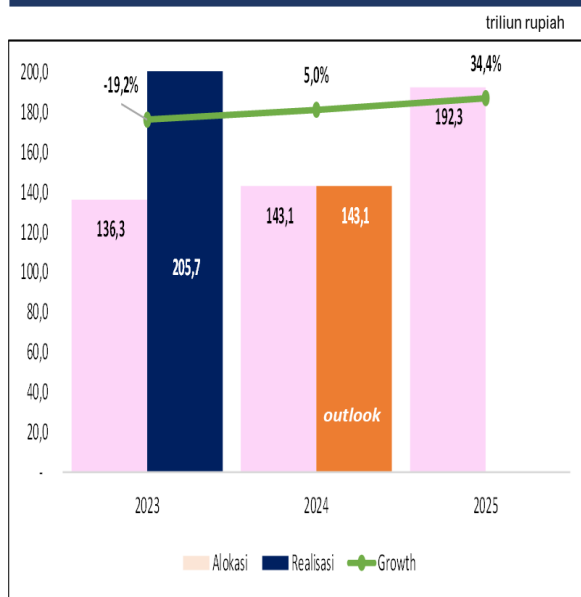
- ✓ Terutama adanya kenaikan sasaran guru bersertifikasi dan perluasan sasaran beberapa jenis DAK Nonfisik.

Beberapa jenis TKD mengalami penurunan karena:

- ✓ Untuk memberi ruang fiskal yang memadai sesuai strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL TA 2025

PERKEMBANGAN DBH TA 2023-2025



□ Pada tahun 2023, dilakukan penyelesaian KB DBH s.d. TA 2022 dan penambahan alokasi DBH reguler, sehingga total realisasi DBH menjadi Rp205,7 Triliun.

KEBIJAKAN DBH TA 2025

1. Alokasi DBH yang berkeadilan dan mendorong pelestarian lingkungan serta perubahan iklim.
2. Penyaluran DBH berdasarkan kinerja.
3. Penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor prioritas dan penguatan sinergi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
4. Transparansi dan akuntabilitas DBH.

POSTUR DANA BAGI HASIL TA 2025

(miliar rupiah)

Jenis DBH	2024 APBN	2025 RAPBN	Selisih	
			Rp	%
Pajak	55.773,9	77.302,8	21.528,9	38,6%
PPh	31.626,6	44.933,1	13.306,5	42,1%
PBB	19.166,6	25.970,8	6.804,2	35,5%
CHT	4.980,8	6.399,0	1.418,2	28,5%
SDA	84.326,0	85.921,0	1.595,0	1,9%
Migas	15.316,0	16.250,9	934,8	6,1%
Minerba	65.079,7	66.402,1	1.322,3	2,0%
Kehutanan	1.464,3	1.104,6	-359,6	-24,6%
Panas Bumi	1.475,8	1.426,6	-49,2	-3,3%
Perikanan	990,2	736,8	-253,3	-25,6%
Lainnya	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Perkebunan Sawit	3.000,0	1.249,9	-1.750,1	-58,3%
Kurang Bayar	0,0	27.808,0	27.808,0	
Total	143.099,9	192.281,7	49.181,8	34,4%

Alokasi DBH dalam RAPBN 2025 sebesar Rp192,3 triliun.

- Alokasi DBH Pajak sebesar Rp77,3 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH PPh** sebesar Rp44,9 triliun.
- Alokasi DBH SDA sebesar Rp85,9 triliun, dengan **alokasi terbesar pada DBH Mineral dan Batubara** sebesar Rp66,4 triliun.
- Alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp1,3 triliun (4% dari perkiraan realisasi penerimaan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar tahun 2024).
- Alokasi minimum DBH Perkebunan Sawit per daerah sebesar Rp500 juta.
- Kurang Bayar DBH dialokasikan sebesar Rp27,8 triliun.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DBH EARMARKED TA 2025

DBH DR

- Optimalisasi penggunaan Sisa DBH DR Kab/Kota sesuai ketentuan perundangan
- Perluasan penggunaan kegiatan strategis lainnya antara lain :
 - ✓ Penguatan Integrated Area Development (IAD)
 - ✓ Pengelolaan kebersihan untuk pelestarian hutan
 - ✓ Pengelolaan jalan sekitar Kawasan
 - ✓ Dukungan pencapaian FOLU Net Sink 2030,
 - ✓ Bantuan jaminan sosial bagi pekerja sektor kehutanan kategori rentan,
 - ✓ Pengelolaan daerah aliran sungai.



DBH CHT

- Digunakan untuk bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan penegakan hukum.
- Penerima manfaat termasuk:
 - petani tembakau dan buruh tani tembakau.
 - petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
- Fleksibilitas penggunaan
 - Opsi pengalihan anggaran.
 - Penambahan menu kegiatan.

DBH Sawit

- Fokus pada infrastruktur jalan (minimal 80% dari alokasi).
- Mendorong pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan:
 - Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan.
 - Sertifikasi ISPO pekebun.
 - Rehab hutan dan lahan.
- Terdapat nilai alokasi minimum per daerah.

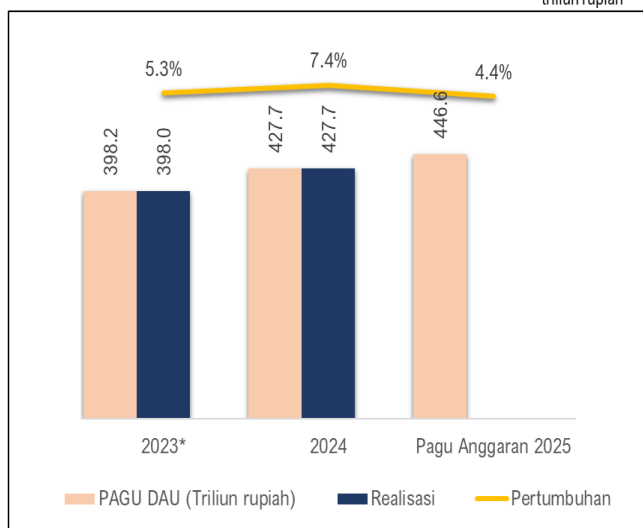


PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAU TA 2025

Pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi dan ekualisasi kualitas layanan dasar daerah

PERKEMBANGAN DAU TA 2023-2025

triliun rupiah



*TA. 2023 termasuk Tambahan DAU untuk THR/G13 Guru ASND sebesar Rp2.2 T
 **(Realisasi 2024 = Outlook 2024)

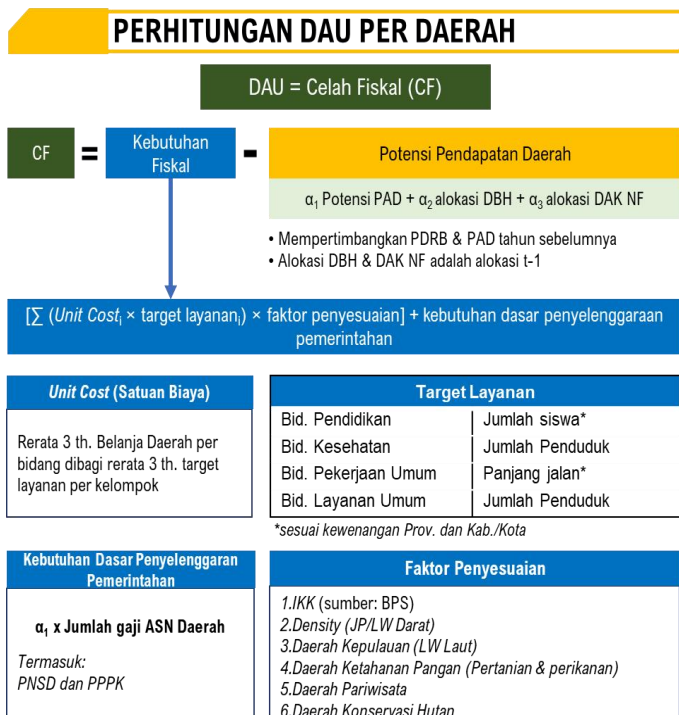
- Pagu DAU tahun 2025 tumbuh sebesar 4,4% dari tahun 2024.

KEBIJAKAN DAU TA 2025

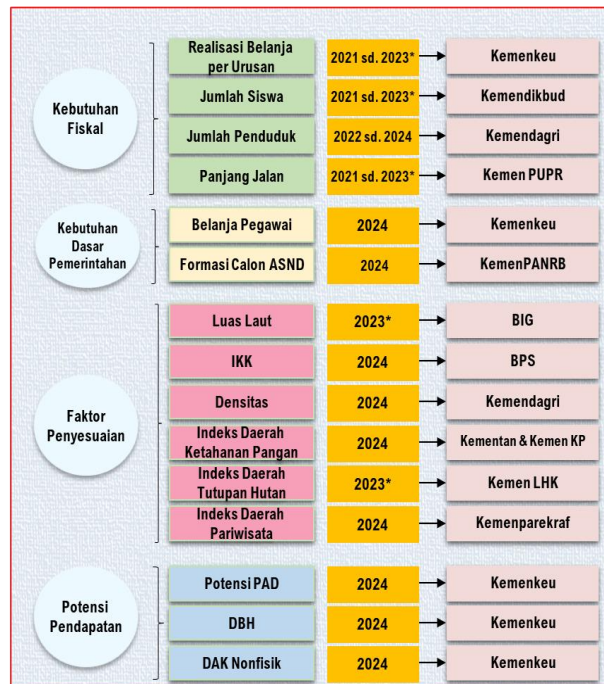
1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU diantaranya kebijakan **holdharmless** sampai 2027.
2. Memperkuat penggunaan **earmarking** DAU.
3. Menjaga tingkat **pemerataan keuangan daerah**.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola **earmarking** DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berbasis **kinerja**.

DATA DASAR & FORMULA DAU TA 2025

Kebijakan formula dan data dasar perhitungan sama dengan tahun sebelumnya



DATA DASAR DAU



PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

(miliar rupiah)

NO	DAU	ALOKASI TA. 2024	ALOKASI TA. 2025		
			RUU APBN	Usulan Kesepakatan Panja TKD	SELISIH Usulan Kesepakatan Panja TKD dengan RUU APBN
1	DAU Blockgrant	343.527,6	358.617,9	360.515,9	1.898,1
2	DAU Earmarked	84.171,7	88.015,9	86.117,8	(1.898,1)
	DAU PPPK	15.676,7	17.253,2	15.355,14	(1.898,1)
	DAU Kelurahan	1.699,6	1.699,6	1.699,6	-
	DAU Pelayanan Dasar	66.795,4	69.063,1	69.063,1	-
	Total	427.699,3	446.633,8	446.633,8	0,0



Penambahan alokasi DAU diarahkan untuk **dukungan kebijakan penggajian formasi ASND** yang akan diangkat tahun 2025 melalui DAU Earmarked Penggajian PPPK 2025, dan dukungan penggajian PPPK eksisting dalam DAU Blockgrant



Penurunan DAU Earmarked dukungan bidang Pendidikan dipengaruhi oleh **peningkatan capaian SPM** bidang Pendidikan secara nasional.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Kesehatan sebagai tambahan pendanaan untuk **mendukung penurunan prevalensi stunting**.



Kenaikan DAU Earmarked dukungan bidang Pekerjaan Umum untuk **mendukung anggaran infrastruktur** sesuai UU HKPD.



Komposisi DAU Earmark tahun 2025 sebesar **19,3%** dari total DAU, lebih rendah jika dibandingkan komposisi DAU Earmark tahun 2024 yang sebesar **19,7%** dari total DAU

- terdapat pergeseran Jumlah DAU Penggajian PPPK ke DAU Yang tidak ditentukan Penggunaanya

PAGU & PERKIRAAN PEMBAGIAN JENIS DAU TA 2025

URAIAN	APBN 2024	RAPBN 2025
THEIL (<i>Weighted</i>) Tanpa DAU	0,21344	0,22857
THEIL (<i>Weighted</i>) Dengan DAU	0,14817	0,14257
Penurunan	- 30,6%	- 37,6%

HASIL PENGHITUNGAN ALOKASI DAU TA. 2025:

1. Formula penghitungan alokasi dan data dasar DAU TA. 2025 melanjutkan perhitungan DAU TA. 2024 sesuai formula dalam UU 1/2022;
2. Dalam alokasi DAU TA. 2025 telah mempertimbangkan **Kebutuhan Daerah terkait pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang diangkat tahun 2024.**
3. Hasil perhitungan alokasi DAU TA. 2025 berhasil menurunkan **indeks Theil sebesar - 37,6 %** dari tanpa DAU sebesar 0,22857 menjadi 0,14257 dengan DAU.
4. Sebagian alokasi DAU per daerah akan ditentukan penggunaannya, antara lain **untuk penggajian PPPK, pendanaan Kelurahan, dan peningkatan layanan bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.**

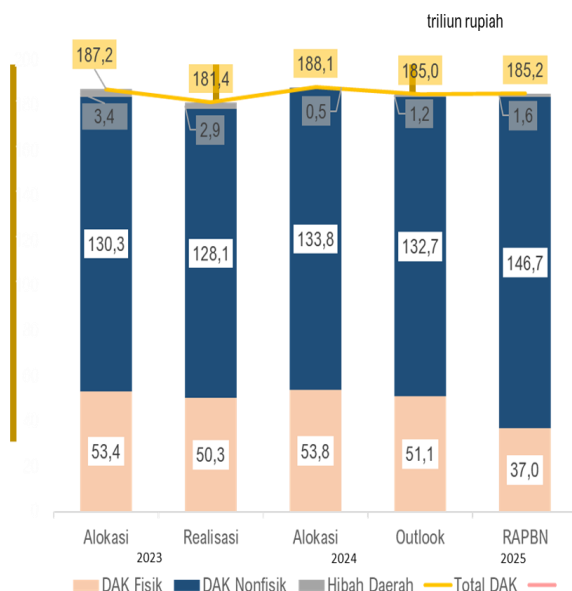
Kebijakan perhitungan alokasi

Penyesuaian alokasi DAU setiap Daerah

- Seluruh Daerah mendapatkan kenaikan alokasi minimal sebesar 2,5% dari alokasi tahun 2024 dan maksimal kenaikan 10% dari alokasi tahun 2024
- Dari penyesuaian tersebut diperoleh hasil:
 1. Seluruh Daerah Provinsi mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.04 %
 2. Seluruh Daerah Kabupaten/Kota mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 4.05 %

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DAK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK TA 2023-2025



- Pagu DAK tahun 2025 turun terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar seluruh siswa/guru di Indonesia dapat menikmati standar kualitas pendidikan yang sama

KEBIJAKAN DAK TA 2025

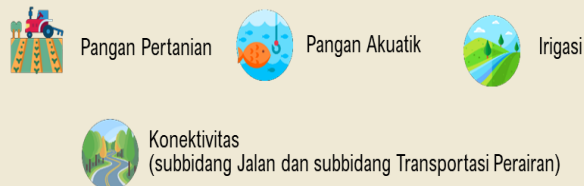
1. **DAK Fisik:** penyediaan **sarana-prasarana fisik layanan dasar** antara lain bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar.
2. **DAK Nonfisik:** **pendanaan operasional layanan publik terutama** bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, pertanian, Sentra Industri dan Koperasi UMK.
3. **Hibah ke Daerah:** mendukung **transportasi perkotaan**, produksi pertanian di dataran tinggi/*upland*, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur pasca bencana.
4. **Matching program dan sinergi pendanaan.**
5. **Meningkatkan kualitas pengelolaan DAK.**

DUKUNGAN, TEMA, & BIDANG DAK FISIK TA 2025

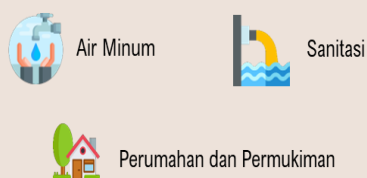
DAK Fisik Layanan Dasar



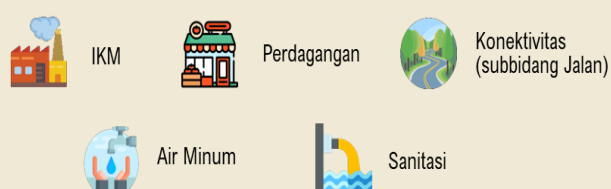
Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN)



Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

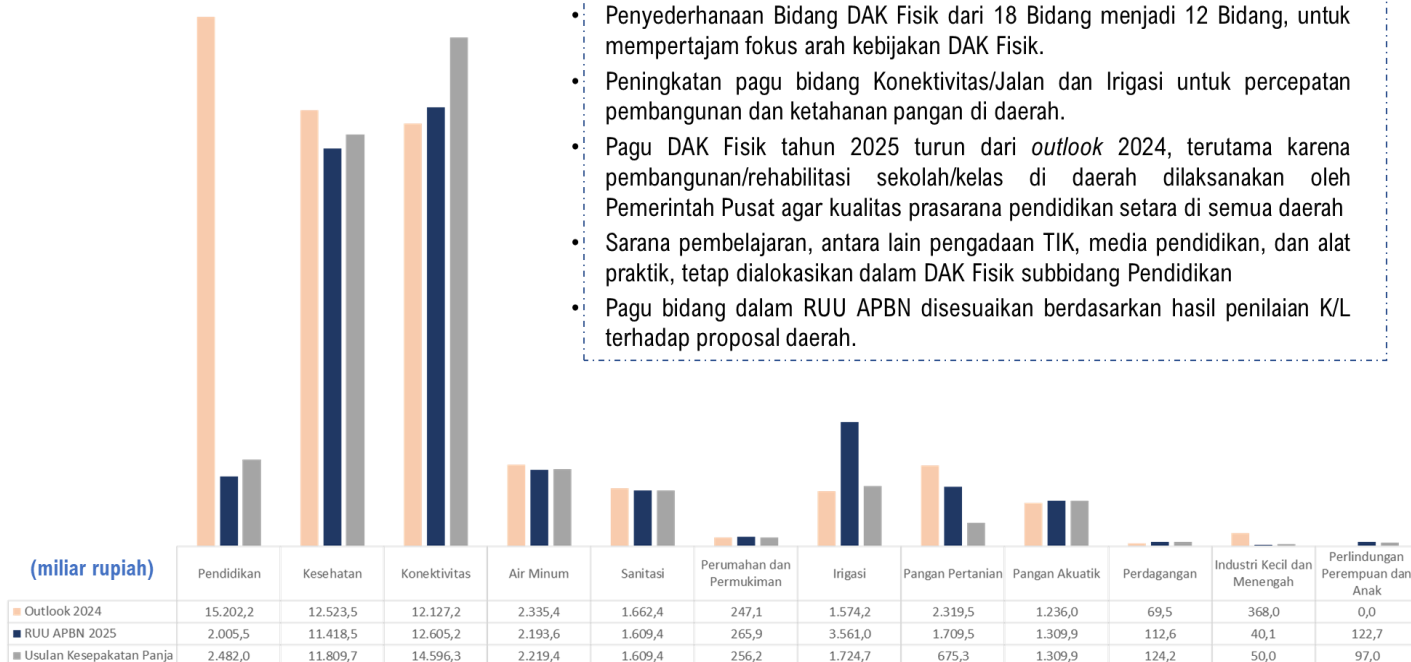


Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri



POSTUR DAK FISIK TA 2025

- Penyederhanaan Bidang DAK Fisik dari 18 Bidang menjadi 12 Bidang, untuk mempertajam fokus arah kebijakan DAK Fisik.
- Peningkatan pagu bidang Konektivitas/Jalan dan Irigasi untuk percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di daerah.
- Pagu DAK Fisik tahun 2025 turun dari *outlook* 2024, terutama karena pembangunan/rehabilitasi sekolah/kelas di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat agar kualitas prasarana pendidikan setara di semua daerah
- Sarana pembelajaran, antara lain pengadaan TIK, media pendidikan, dan alat praktik, tetap dialokasikan dalam DAK Fisik subbidang Pendidikan
- Pagu bidang dalam RUU APBN disesuaikan berdasarkan hasil penilaian K/L terhadap proposal daerah.



POSTUR DAK FISIK TA 2025

(Miliar Rupiah)

No	Bidang	Outlook 2024	APBN 2025		Selisih
			RUU	2025	
				Usulan/Kesepakatan Panja TKD	
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Pendidikan	15.202,2	2.005,5	2.482,0	476,5
2	Kesehatan	12.523,5	11.418,5	11.809,7	391,2
3	Konektivitas (Jalan+Transportasi Perairan)	12.127,2	12.605,2	14.596,3	
	- Sub Bidang Jalan	11.777,6	12.205,2	14.258,7	2.053,4
	- Sub Bidang Transportasi Perairan	349,6	399,9	337,6	-62,3
4	Air Minum	2.335,4	2.193,6	2.219,4	25,8
5	Sanitasi	1.662,4	1.609,4	1.609,4	-
6	Irigasi	1.574,2	3.561,0	1.724,7	-1.836,3
7	Perlindungan Perempuan dan Anak	-	122,7	97,0	-25,7
8	Perumahan dan Permukiman	247,1	265,9	256,2	-9,7
9	Pangan Pertanian	2.319,5	1.709,5	675,3	-1.034,2
10	Kelautan dan Perikanan/Pangan Akuatik	1.236,0	1.309,9	1.309,9	-
11	Perdagangan	69,5	112,6	124,2	11,6
12	Industri Kecil dan Menengah	368,0	40,1	50,0	9,9
	Lainnya	1.477,3	-	-	-
TOTAL DAK FISIK		51.142,5	36.953,9	36.953,9	-

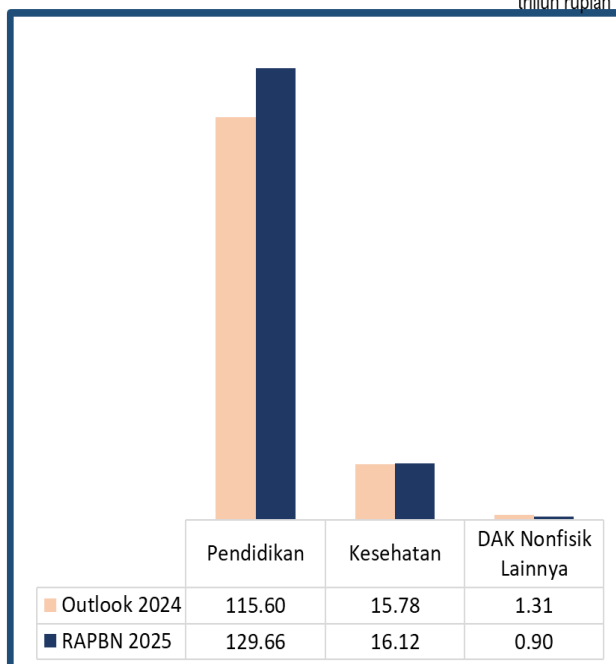
Berdasarkan penilaian atas usulan daerah dilakukan penyesuaian pagu bidang/sub bidang sebagai berikut:

- ▶ Pagu bidang irigasi, perumahan permukiman, perlindungan perempuan dan anak, serta pangan pertanian diturunkan sesuai hasil penilaian.
- ▶ Sisa pagu hasil penilaian dialihkan sesuai dengan prioritas pembangunan terutama ke bidang Pendidikan (Rp476 M), Kesehatan (Rp391 M), dan Jalan (Rp2,1 T)

POSTUR DAK NONFISIK TA 2025

PERKEMBANGAN DAK NON FISIK TA 2024-2025

triliun rupiah



Simplifikasi Jenis dari sebelumnya 16 menjadi 14 jenis, dengan penambahan Pagu DAK Nonfisik karena:

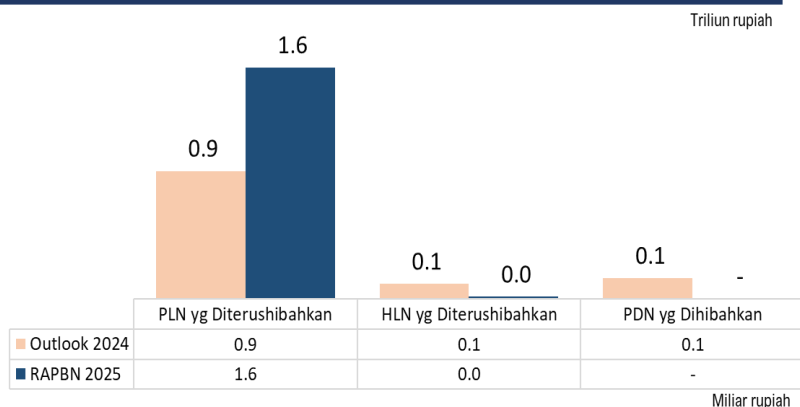
- kenaikan jumlah guru bersertifikat, dan
- kenaikan sasaran terutama BOSP, PK2UMK, dan Pertanian.

Miliar rupiah

No.	Rincian DAK NonFisik	Outlook APBN 2024	RAPBN 2025
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.865,6	53.491,7
2	Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD	4.009,1	4.038,7
3	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.618,8	1.741,2
4	Tunjangan Profesi Guru ASND	52.805,5	66.921,6
5	Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.219,4	738,2
6	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.910,7	2.404,5
7	BOP Museum dan Taman Budaya	170,0	170,0
8	Dana BPP Perpustakaan Daerah	-	150,0
9	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.541,8	12.878,7
10	Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.239,3	3.239,3
11	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	250,0	163,7
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	133,3	0,0
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	62,7	0,0
14	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129,9	132,0
15	Dana Fasilitas Penanaman Modal	247,4	0,0
16	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	295,7	516,4
	- Subjenis Pangan		88,4
	- Subjenis Pertanian		211,7
	- Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian		216,3
17	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	194,9	92,0
TOTAL		132.694,1	146.677,9

POSTUR HIBAH DAERAH TA 2025

PERKEMBANGAN HIBAH DAERAH TA 2024-2025



- Pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 dialokasikan untuk 3 jenis Hibah kepada Daerah (Hibah MRT, Hibah UPLAND, dan Hibah BioCF ISFL).
- **Kenaikan** pagu Hibah kepada Daerah TA 2025 karena adanya peningkatan alokasi hibah untuk program MRT.

Target Output 2025, antara lain:

PERHUBUNGAN

- Lanjutan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2A sepanjang ± 5,8 km.
- Pembangunan jalur MRT Jakarta koridor Timur Barat Fase 1 Tahap 1 sepanjang ± 1,77 km.

PERTANIAN

- Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 102 km, terasering lahan seluas 15 ha, bantuan saprodi untuk 3.357 ha, dan pengadaan alsintan sebanyak 2.045 unit

LINGKUNGAN HIDUP

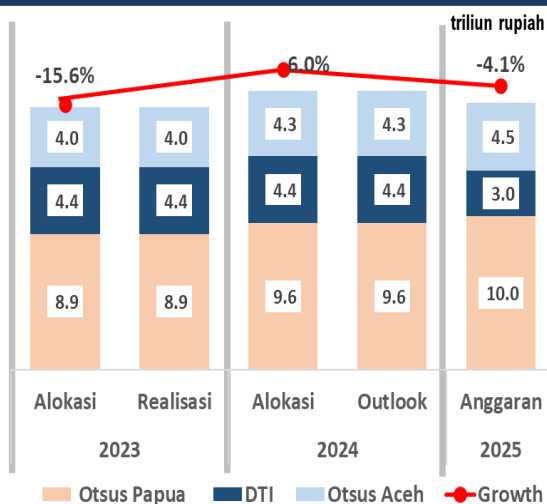
- Mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan sebesar 3 juta ton Co2eq; dan
- Pengelolaan area hutan dan lahan secara berkelanjutan pada 4 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Jenis Hibah kepada Daerah	Outlook 2024	RAPBN 2025 Nota Keuangan	Program/ Kegiatan
A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	881,9	1.594,9	
B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	102,9	14,1	Pertanian, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup
C. Penerimaan Dalam Negeri yang Diberibahkan	142,7	0	
Total	1.127,5	1.609,0	

Miliar rupiah

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA OTSUS & DTI TA 2025

PERKEMBANGAN OTONOMI KHUSUS TA 2023-2025



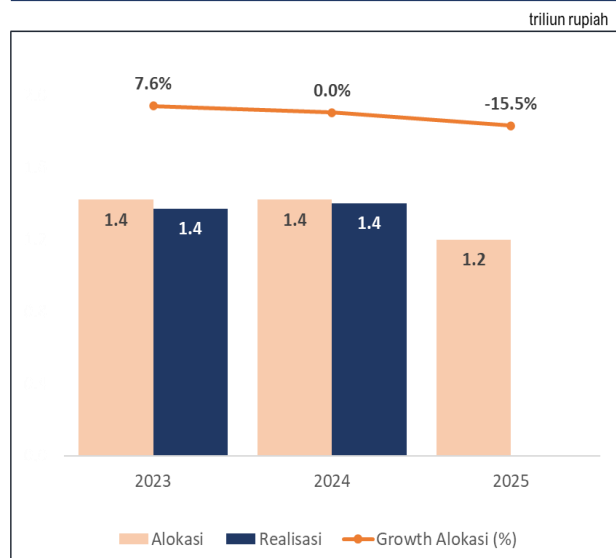
- ❑ Pagu Dana Otsus (Aceh dan Papua) TA 2025 meningkat akibat peningkatan pagu DAU.
- ❑ Pagu DTI TA 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS TA 2025

1. Mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus, untuk:
 - a. **Penurunan kemiskinan:** perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan.
 - b. **Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah:** penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan.
 - c. **Mendukung capaian rencana induk** percepatan pembangunan papua untuk mewujudkan papua sehat, papua cerdas, dan papua produktif.
2. **Meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus** melalui sinergi pendanaan APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
3. **Meningkatkan kualitas SDM** pengelola Dana Otsus terutama di DOB, melalui asistensi dan pembinaan yang intensif dan berkesinambungan.
4. Penggunaan DTI pada DOB, diprioritaskan untuk pembangunan **infrastruktur penunjang** gedung perkantoran.

PERKEMBANGAN & KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

PERKEMBANGAN DAIS TA 2023-2025



- Pagu alokasi Dana keistimewaan 2025 lebih rendah karena strategi pelaksanaan prioritas nasional di daerah oleh K/L serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

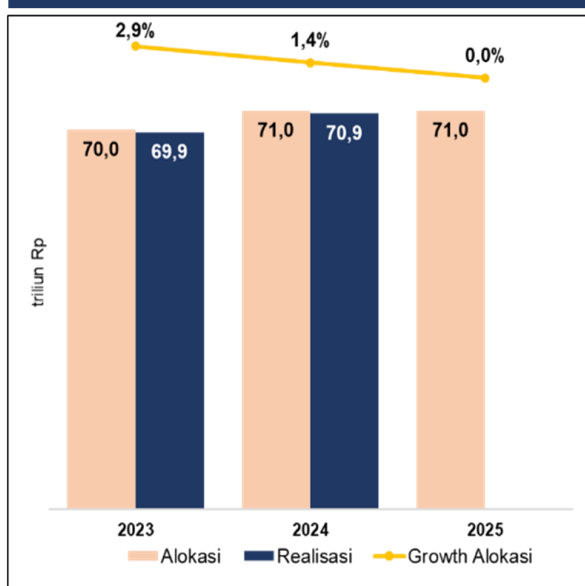
KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DIY TA 2025

1. Mengarahkan **penggunaan** Dana Keistimewaan fokus untuk:
 - a. penurunan tingkat kemiskinan;
 - b. pemberdayaan masyarakat dan UMKM,
 - c. peningkatan penyediaan layanan dasar publik,
 - d. serta mengurangi belanja birokrasi penunjang, administrasi dan pengawasan;
2. Meningkatkan **sinergi** dengan Belanja K/L untuk pencapaian **prioritas nasional** dengan mempertimbangkan prioritas daerah.
3. Meningkatkan **tata kelola pemanfaatan** Dana Keistimewaan DIY yang inovatif, partisipatif, dan transparan **melalui** pengembangan **sistem informasi yang terintegrasi** secara berkelanjutan.

PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2023-2025



*) Outlook realisasi tahun 2024.

- Pagu Dana Desa tahun 2025 naik sebesar 0,2% dari outlook realisasi tahun 2024.

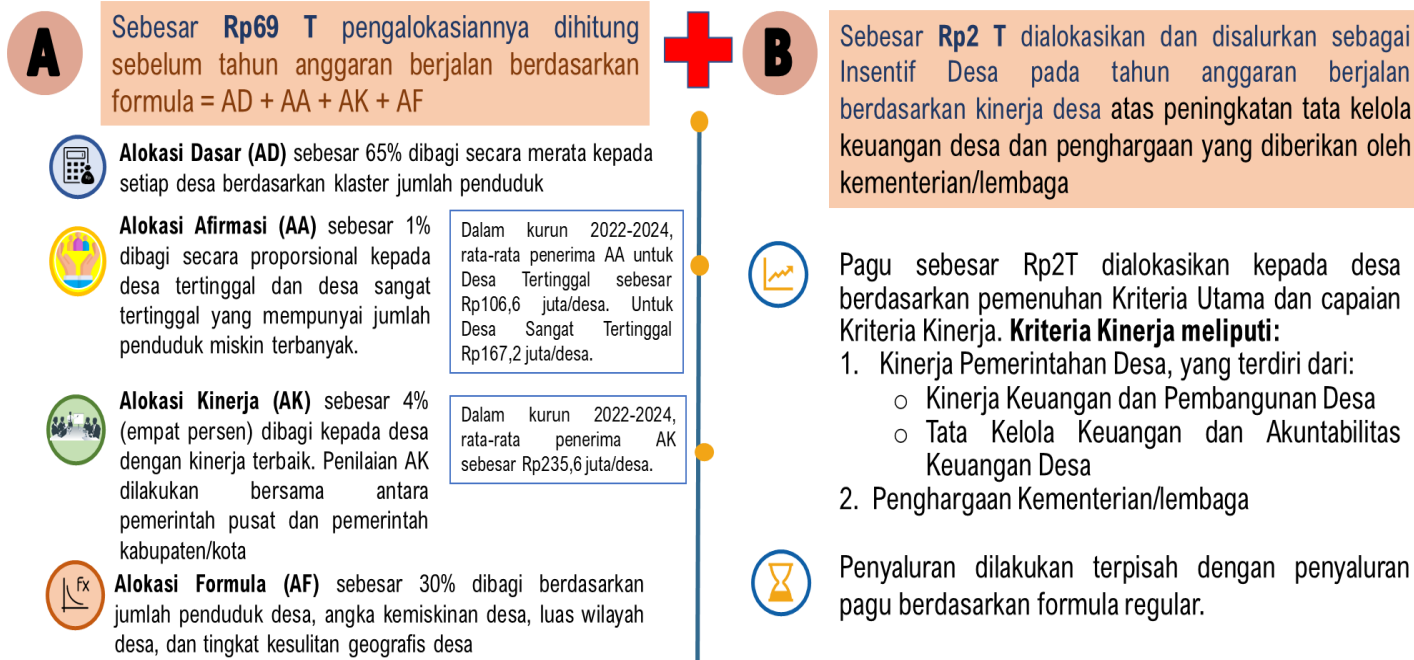
KEBIJAKAN DANA DESA TA 2025

1. **Mendorong peningkatan kemandirian desa & kualitas tata kelola Dana Desa** melalui:
 - a. penyaluran Dana Desa berdasarkan fokus penggunaan yang ditetapkan,
 - b. penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD,
 - c. pemberian *reward* berupa alokasi kinerja dan insentif desa,
 - d. pemberian reward penyaluran Dana Desa lebih besar pada tahap I kepada desa berstatus Mandiri, dan
 - e. penerapan sanksi terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal.
2. **Mengarahkan fokus penggunaan Dana Desa** melalui:
 - a. penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa paling tinggi 15%,
 - b. penguatan desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim,
 - c. promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan desa termasuk stunting,
 - d. dukungan program ketahanan pangan,
 - e. pengembangan potensi dan keunggulan desa,
 - f. percepatan implementasi desa digital,
 - g. pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal,
 - h. operasional pemerintah desa paling tinggi 3%, dan/atau
 - i. program sektor prioritas lainnya di desa.
3. **Meningkatkan kualitas data keuangan desa berbasis elektronik terintegrasi dalam rangka memperkuat monitoring dan evaluasi.**

FORMULA PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2025

Pagu Rp71 T dialokasikan kepada 75.259 desa di 434 Kab/Kota

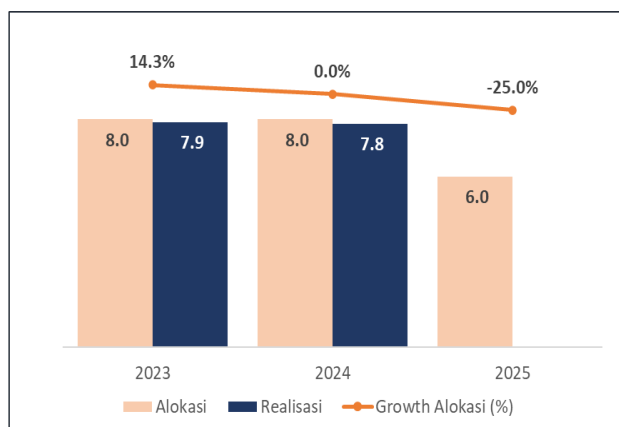
Yang terdiri atas:



PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Mendorong kinerja Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata Kelola APBD

PERKEMBANGAN DANA INSENTIF FISKAL TA 2023-2025



- ❑ Outlook penyaluran insentif fiskal 2024 sebesar Rp7,8 triliun, dimana terdapat beberapa daerah yang tidak dapat disalurkan karena tidak memenuhi syarat salur
- ❑ Pagu Insentif Fiskal tahun 2025 lebih rendah karena kinerja daerah juga diperhitungkan di alokasi DAU dan DBH serta untuk mendukung TKD *mandatory* diantaranya untuk penggajian P3K.

KEBIJAKAN INSENTIF FISKAL TA 2025

1. Pengalokasian berdasarkan **kinerja tahun anggaran sebelumnya** dan **tahun anggaran berjalan**;
2. Indikator kinerja tahun sebelumnya meliputi **pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar**;
3. Indikator kinerja tahun berjalan meliputi dukungan **pencapaian target prioritas nasional**
4. Mendorong peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan **kemandirian daerah**, antara lain melalui peningkatan pajak daerah, retribusi daerah, dan/atau sumber pembiayaan lain.
5. Melanjutkan **pemberian Insentif Fiskal kepada daerah tertinggal** dengan tetap memperhatikan kinerja daerah tertinggal.

FORMULA PENGALOKASIAN INSENTIF FISKAL TA 2025

Pagu Rp6,0 T dialokasikan Atas Kinerja Tahun Sebelumnya dan Tahun Berjalan

Yang terdiri atas:

A

Sebesar Rp4,0 T pengalokasiannya didasarkan atas kinerja pemda tahun sebelumnya



Dilakukan klusterisasi daerah dalam upaya untuk meningkatkan keadilan dalam penilaian. Klusterisasi menggunakan peta kapasitas fiskal dan klaster daerah tertinggal



Dilakukan filterisasi berupa pemenuhan atas opini BPK atas LKPD dan penetapan APBD tepat waktu, dalam upaya untuk peningkatan tata Kelola keuangan daerah



Alokasi diberikan kepada daerah dengan peringkat terbaik untuk provinsi, kabupaten, dan kota untuk tiap kategori kinerja di setiap klaster.



B

Sebesar Rp2,0 T pengalokasiannya didasarkan atas kinerja pemerintah daerah tahun berjalan



Kinerja pemda yang digunakan diarahkan untuk dapat mendukung fokus kebijakan nasional di tahun berjalan, antara lain: penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan/atau percepatan belanja daerah.



Pengalokasian insentif fiskal dilakukan dalam beberapa periode atas kinerja dalam rentang waktu tertentu di tahun berjalan, dalam upaya untuk percepatan perbaikan kinerja daerah.



RINCIAN ALOKASI TRANSFER KE DAERAH TA 2025



REKAPITULASI ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU

(dalam ribuan rupiah)

NO	PEMERINTAH DAERAH	DANA BAGI HASIL	DANA ALOKASI UMUM	DAK FISIK	DAK NONFISIK	DANA DESA	INSENTIF FISKAL	JUMLAH
1	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	295.679.141	1.212.467.338	188.291.265	367.681.542	-	23.236.157	2.087.355.443
2	KAB. NATUNA	185.494.688	444.844.931	82.731.838	75.691.108	52.257.709	13.921.767	854.942.041
3	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS	125.025.646	411.148.179	42.360.093	61.863.312	38.498.598	7.307.880	686.203.708
4	KAB. KARIMUN	83.529.744	483.784.277	41.941.888	150.696.858	36.624.884	16.051.813	812.629.464
5	KOTA BATAM	211.688.058	914.367.956	20.774.811	445.797.725	-	15.514.202	1.608.142.752
6	KOTA TANJUNG PINANG	50.449.448	513.669.776	43.381.563	105.307.992	-	7.137.634	719.946.413
7	KAB. LINGGA	46.768.716	511.959.105	42.114.523	108.528.207	59.290.486	7.349.455	776.010.492
8	KAB. BINTAN	57.707.345	527.224.048	158.272.687	111.955.967	31.325.103	21.302.091	907.787.241
JUMLAH		1.056.342.786	5.019.465.610	619.868.668	1.427.522.711	217.996.780	111.820.999	8.453.017.554



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	2.087.355.443
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	295.679.141
1. DBH Pajak	237.893.000
a. Pajak Penghasilan	206.064.373
b. Pajak Bumi dan Bangunan	31.447.645
c. Cukai Hasil Tembakau	380.982
2. DBH Sumber Daya Alam	56.629.707
a. Migas	49.431.811
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	6.628.549
c. Kehutanan	569.347
d. Perikanan	-
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.156.434
a. Perkebunan Sawit	1.156.434
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	1.212.467.338
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	1.028.022.258
2. DAU ditentukan penggunaannya	184.445.080
a. Penggajian Formasi PPPK	83.540.028
b. Pendanaan Kelurahan	-
c. Bidang Pendidikan	74.094.740
d. Bidang Kesehatan	13.935.451
e. Bidang Pekerjaan Umum	12.874.861
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	555.972.807
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	188.291.265
a. Pendidikan	10.945.976
b. Kesehatan	77.062.832
c. Konektivitas	65.440.941
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	30.500.000
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	4.341.516
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	367.681.542
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	204.449.348
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	139.681.049
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	3.881.478
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	200.000
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	999.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	13.379.925
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	450.742
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	4.640.000
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	23.236.157



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. NATUNA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	854.942.041
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	185.494.688
1. DBH Pajak	100.864.638
a. Pajak Penghasilan	18.831.035
b. Pajak Bumi dan Bangunan	82.033.603
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	84.630.050
a. Migas	78.153.252
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	1.039.028
c. Kehutanan	34.963
d. Perikanan	5.402.807
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	444.844.931
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	332.626.205
2. DAU ditentukan penggunaannya	112.218.726
a. Penggajian Formasi PPPK	13.241.884
b. Pendanaan Kelurahan	1.400.000
c. Bidang Pendidikan	39.948.786
d. Bidang Kesehatan	21.068.145
e. Bidang Pekerjaan Umum	36.559.911
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	158.422.946
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.731.838
a. Pendidikan	1.211.814
b. Kesehatan	12.090.000
c. Konektivitas	54.938.874
d. Air Minum	454.900
e. Sanitasi	1.156.444
f. Perumahan dan Permukiman	6.023.295
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	6.856.511
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	75.691.108
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	18.420.948
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	38.957.197
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	14.760.731
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.046.542
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	52.257.709
E. Insentif Fiskal	13.921.767



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KEPULAUAN ANAMBAS

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	686.203.708
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	125.025.646
1. DBH Pajak	71.297.318
a. Pajak Penghasilan	24.027.181
b. Pajak Bumi dan Bangunan	47.270.137
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	53.728.328
a. Migas	48.709.371
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	660.381
c. Kehutanan	5.790
d. Perikanan	4.352.786
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	411.148.179
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	242.706.717
2. DAU ditentukan penggunaannya	168.441.462
a. Penggajian Formasi PPPK	69.749.883
b. Pendanaan Kelurahan	400.000
c. Bidang Pendidikan	39.185.321
d. Bidang Kesehatan	19.981.897
e. Bidang Pekerjaan Umum	39.124.361
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	104.223.405
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	42.360.093
a. Pendidikan	885.889
b. Kesehatan	18.265.565
c. Konektivitas	23.208.639
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	61.863.312
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	14.489.817
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	30.301.032
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	14.222.831
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.343.942
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	38.498.598
E. Insentif Fiskal	7.307.880



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. KARIMUN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	812.629.464
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	83.529.744
1. DBH Pajak	48.960.848
a. Pajak Penghasilan	35.125.329
b. Pajak Bumi dan Bangunan	13.835.519
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	32.703.386
a. Migas	14.065.153
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	16.009.125
c. Kehutanan	6.627
d. Perikanan	2.622.481
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.865.510
a. Perkebunan Sawit	1.865.510
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	483.784.277
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	358.681.624
2. DAU ditentukan penggunaannya	125.102.653
a. Penggajian Formasi PPPK	41.872.232
b. Pendanaan Kelurahan	5.800.000
c. Bidang Pendidikan	46.122.523
d. Bidang Kesehatan	17.918.821
e. Bidang Pekerjaan Umum	13.389.077
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	192.638.746
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	41.941.888
a. Pendidikan	1.157.846
b. Kesehatan	7.046.500
c. Konektivitas	33.737.542
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	150.696.858
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	52.123.339
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	83.086.548
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	-
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	12.095.056
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	2.991.255
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	36.624.884
E. Insentif Fiskal	16.051.813



**DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA BATAM**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	1.608.142.752
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	211.688.058
1. DBH Pajak	194.522.937
a. Pajak Penghasilan	190.274.708
b. Pajak Bumi dan Bangunan	4.248.229
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	17.165.121
a. Migas	14.065.153
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	651.297
c. Kehutanan	8.499
d. Perikanan	2.440.172
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	914.367.956
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	761.669.790
2. DAU ditentukan penggunaannya	152.698.166
a. Penggajian Formasi PPPK	53.432.165
b. Pendanaan Kelurahan	12.800.000
c. Bidang Pendidikan	64.364.068
d. Bidang Kesehatan	18.260.282
e. Bidang Pekerjaan Umum	3.841.651
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	466.572.536
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	20.774.811
a. Pendidikan	774.498
b. Kesehatan	16.716.858
c. Konektivitas	-
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	3.283.455
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	445.797.725
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	252.268.251
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	156.082.609
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	800.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	28.385.885
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	7.071.320
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	789.000
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	15.514.202



**DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KOTA TANJUNG PINANG**

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	719.946.413
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	50.449.448
1. DBH Pajak	33.954.041
a. Pajak Penghasilan	30.363.379
b. Pajak Bumi dan Bangunan	3.590.662
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	15.666.343
a. Migas	14.065.153
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	646.904
c. Kehutanan	10.388
d. Perikanan	943.898
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	829.064
a. Perkebunan Sawit	829.064
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	513.669.776
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	441.792.313
2. DAU ditentukan penggunaannya	71.877.463
a. Penggajian Formasi PPPK	10.537.752
b. Pendanaan Kelurahan	3.600.000
c. Bidang Pendidikan	32.432.938
d. Bidang Kesehatan	19.843.160
e. Bidang Pekerjaan Umum	5.463.613
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	148.689.555
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	43.381.563
a. Pendidikan	600.287
b. Kesehatan	12.492.000
c. Konektivitas	27.210.082
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	3.079.194
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	105.307.992
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	42.234.590
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	43.525.432
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	714.656
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	15.338.817
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	1.988.807
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	1.000.000
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-
D. Dana Desa	-
E. Insentif Fiskal	7.137.634



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. LINGGA

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	776.010.492
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	46.768.716
1. DBH Pajak	23.750.222
a. Pajak Penghasilan	17.964.762
b. Pajak Bumi dan Bangunan	5.785.460
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	23.018.494
a. Migas	14.358.177
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	3.253.358
c. Kehutanan	57.544
d. Perikanan	5.349.415
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	-
a. Perkebunan Sawit	-
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	511.959.105
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	336.108.461
2. DAU ditentukan penggunaannya	175.850.644
a. Penggajian Formasi PPPK	46.518.507
b. Pendanaan Kelurahan	1.800.000
c. Bidang Pendidikan	45.016.837
d. Bidang Kesehatan	34.517.737
e. Bidang Pekerjaan Umum	47.997.563
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	150.642.730
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	42.114.523
a. Pendidikan	476.098
b. Kesehatan	8.672.514
c. Konektivitas	31.325.353
d. Air Minum	-
e. Sanitasi	-
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	-
j. Industri Kecil dan Menengah	-
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	1.640.558
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	108.528.207
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	22.900.316
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	62.017.866
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	656.920
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	16.285.853
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.055.062
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	-
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.106.500
D. Dana Desa	59.290.486
E. Insentif Fiskal	7.349.455



DAFTAR ALOKASI DANA TRANSFER KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KAB. BINTAN

(dalam ribuan rupiah)

URAIAN	ALOKASI
TRANSFER KE DAERAH	907.787.241
A. Dana Bagi Hasil (DBH)	57.707.345
1. DBH Pajak	36.722.654
a. Pajak Penghasilan	29.789.475
b. Pajak Bumi dan Bangunan	6.933.179
c. Cukai Hasil Tembakau	-
2. DBH Sumber Daya Alam	19.002.983
a. Migas	14.065.153
b. Pertambangan Mineral dan Batu Bara	650.354
c. Kehutanan	14.318
d. Perikanan	4.273.158
e. Panas Bumi	-
3. DBH Lainnya	1.981.708
a. Perkebunan Sawit	1.981.708
B. Dana Alokasi Umum (DAU)	527.224.048
1. DAU tidak ditentukan penggunaannya	413.586.122
2. DAU ditentukan penggunaannya	113.637.926
a. Penggajian Formasi PPPK	38.731.350
b. Pendanaan Kelurahan	3.000.000
c. Bidang Pendidikan	33.620.085
d. Bidang Kesehatan	18.226.024
e. Bidang Pekerjaan Umum	20.060.467
C. Dana Alokasi Khusus (DAK)	270.228.654
1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	158.272.687
a. Pendidikan	600.287
b. Kesehatan	64.848.849
c. Konektivitas	58.368.556
d. Air Minum	7.108.995
e. Sanitasi	5.970.000
f. Perumahan dan Permukiman	-
g. Irigasi	-
h. Pangan Pertanian	-
i. Pangan Akuatik	13.376.000
j. Industri Kecil dan Menengah	8.000.000
k. Perdagangan	-
l. Perlindungan Perempuan dan Anak	-
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik	111.955.967
a. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	36.527.314
b. Tunjangan Guru ASN Daerah	52.579.880
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	800.000
d. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	11.740.671
e. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	3.103.412
f. Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-
g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	3.473.500
h. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	505.690
i. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-
j. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.225.500
D. Dana Desa	31.325.103
E. Insentif Fiskal	21.302.091

TIM PENYUSUN

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TA 2025

PEMBINA	:	Luky Alfirman	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
PENGARAH	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ludiro2. Sandy Firdaus3. Purwanto4. Jaka Sucipta5. Lydia Kurniawati Christyana6. Adriyanto7. Agung Widiadi	<p>Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan</p> <p>Direktur Dana Transfer Umum</p> <p>Direktur Dana Transfer Khusus</p> <p>Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan</p> <p>Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah</p> <p>Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer</p>
KETUA	:	Iwan Richard Butarbutar	Ketua Tim Reguler Penyaluran Dana Transfer
ANGGOTA	:	Kindy Rinaldy Syahrir, Mauliate Harnalyes Silitonga, Yuni Ariani, Bondan Widyatmoko, Aan Prianto, Ricka Yunita Prasetya, Tatang, Endah Pusparini, Rini Anjar Sari, Rahmatullah Priyo Kusuma, Ryan Andhika Wahyu Putra, Honiar Arfianto	
KONTRIBUTOR DATA	:	<ol style="list-style-type: none">1. Tim Reguler Dana Alokasi Umum2. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam3. Tim Reguler Dana Bagi Hasil Non Sumber Daya Alam4. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Umum5. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pengembangan Manusia dan Kebudayaan6. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Fisik Sektor Pembangunan Perekonomian dan Kemaritiman7. Tim Reguler Dana Alokasi Khusus Nonfisik8. Tim Reguler Hibah Daerah9. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Transfer Khusus10. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa11. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus12. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan13. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	



TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan

Gedung Radius Prawiro, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1
Jakarta-10710





2025

BUKU ALOKASI DAN RANGKUMAN KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025



**Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Radius Prawiro, Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta - 10710

www.djpk.kemenkeu.go.id

